



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM/AUDIENSI KOMISI IX DPR RI
DENGAN KOMISI IV DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : RDPU/Audiensi
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Rabu, 15 Januari 2025
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Acara : Terkait Pelaksanaan Program Makan Gizi Gratis
Waktu : Pukul 10.53 s.d. 11.52 WIB
Ketua Rapat : H. Ahmad Safei, S.H., M.H. (Anggota Komisi IX DPR RI/F-PDI PERJUANGAN)
Sekretaris Rapat : Lilis Suryani S.E., S.Sos, M.A (Plt. Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI)
Hadir : **A. PIMPINAN DAN ANGGOTA:**
1 orang Anggota hadir dari 43 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:

I. PIMPINAN:

-

II. ANGGOTA:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

1 orang Anggota dari 7 Anggota

1. H. Ahmad Safei, S.H., M.H

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F-P. GOLKAR)**

0 orang Anggota dari 7 Anggota

-

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA (F-P. GERINDRA)**

0 orang Anggota dari 5 Anggota

-

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
(F-P. NASDEM)**

0 orang Anggota dari 4 Anggota

-

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F-PKB)**

0 orang Anggota dari 4 Anggota

-

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
(F-PKS)**

0 orang Anggota dari 4 Anggota

-

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)**

0 orang Anggota dari 4 Anggota

-

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
(F-P. DEMOKRAT)**

0 orang Anggota dari 3 Anggota

-

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Andi Muh. Saenuddin, S.Si., M.Si. (Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara)
2. Hj. Isyatin Aswad (Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara)
3. Hj. Gunartin, S.E. (Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara)
4. Dra. Hj. Muniarty M. Ridwan Zakaria (Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara)
5. Muhammad Mustashim Saefullah, S.Ars. (Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara)
6. Ali Mardan, S.Sos. (Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara)
7. La Ode Muzzafar, S.H. (Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara)
8. Hj. Isyatin Syam, S.Ip. (Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara)

JALANNYA RAPAT:

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.53 WIB)

KETUA RAPAT (H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H./F.PDI PERJUANGAN KOMISI IX DPR RI):

Ya, kita mulai ya? Baik. Mohon izin.

Bismillahirrohmannirrohim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* bahwa pagi ini kita masih bisa hadir di tempat ini rapat audiensi dengan teman-teman dari DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya pada Komisi IV.

Pertama, saya ingin menjelaskan sedikit dulu bahwa, mohon maaf karena ini masih suasana reses sehingga teman-teman di Komisi IX ini memang lagi tidak ada semua. Yang kebetulan memang saya karena ada kegiatan partai *insyaallah* besok, ya saya hadir pada hari ini. Untuk itu, terima kasih banyak pada teman-teman Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah hadir. Ini luar biasa, ya, dan untuk kita mulai, kita mulai dengan berdoa masing-masing sesuai dengan kepercayaannya.

Doa dimulai.

(RAPAT: BERDOA)

Selesai.

Alhamdulillah bahwa kami di Komisi IX sudah menerima surat dari DPRD Sulawesi Tenggara terkait dengan penyampaian aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara terkait dengan makan bergizi gratis ini. Ya, memang ini menjadi, apa ya, menjadi, ya, bahan perbincangan di seluruh Indonesia kayaknya.

Kita di tanggal 13 lalu sudah rapat audiensi dengan Badan Gizi Nasional, tapi sifatnya memang sangat terbatas dan saya kira sementara akan disampaikan banyak oleh tenaga ahli, ya, bagian Komisi IX terkait dengan perjalanan ini karena kami sendiri baru satu kali. Kalau kami yang baru karena (*suara tidak jelas*) pembahasan untuk anggaran makan bergizi ini sudah dibahas sejak tahun 2024 yang lalu oleh DPR yang lalu.

Kalau saya sendiri, tapi dengan teman-teman yang baru ini karena kami juga cukup banyak yang baru di sini di Komisi IX ini, baru sekali kalau pertemuan. Itu pun hanya membahas tentang pergeseran, ya, pergeseran anggaran dari. Ada yang tergeser dari yang seharusnya menjadi biaya bahan, kemudian digeser menjadi kesepakatan dan yang pasti bahwa *insyaallah* program ini akan berjalan.

Yang pagunya kemarin sudah ditetapkan sebesar 71 triliun yang disalah diperuntukan untuk 17 juta, ya, sekian, ya, orang. Tetapi memang ini akan masih berjalan terus dan diperkirakan akan mencapai mungkin seratusan empat puluhan triliun, begitu, untuk memenuhi semua kebutuhan sekitar 80 juta orang, ya.

Jadi, target makan gratis ini makan gizi gratis, 80 juta, yang baru disediakan anggarannya itu baru untuk 17, iya, ya? Benar ya? 17 juta. Jadi, ini akan bergeser terus penyampaian badan gizi kemarin kepada kita bahwa *insyaallah* dalam waktu singkat ini, mungkin 1 bulan, 2 bulan, kalau dilihat ada lagi anggaran yang memadai mungkin akan dicukupkan lagi untuk ditingkatkan, mungkin sampai dengan tahun 2025 ini 50 juta orang

Nah, itu yang mungkin pengantar dari saya. Sekedar pengantar dari saya, tapi *insyaallah* kita semua sepakat, di Komisi IX sudah sepakat kemarin bahwa program ini akan dilaksanakan. Ya, bagaimana kemudian mekanisme dinamikanya seperti apa di lapangan, kami juga menyaring betul bukan hanya Bapak-bapak sekalian, tapi kami juga ketika reses ini juga kami temukan. Ini dipertanyakan orang seperti apa mekanisme ini, 17 juta yang sementara waktunya ditargetkan dimana-mana sekarang. Apa seluruh Indonesia sudah berjalan atau hanya di Pulau Jawa dulu atau di mana dulu.

Nah ini yang memang masih dalam, tapi kami sepakat kemarin, jalan saja dulu nanti dalam perjalanannya baru kita mengevaluasi seperti apa ini perjalanannya. Apakah memang akan dipihakketigakan atau akan ditangani langsung oleh badan gizi atau apa, begitu. Ya, karena yang di daerah banyak, ya tentu dengan uji coba-uji coba yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari teknik. Itu yang banyak.

Jadi, para prinsipnya itu uji coba, ya, pada prinsipnya itu uji coba. Bukan, ah, apa. Itu mungkin pengantar dari saya. Kemudian teman-teman dari, ada dari TA yang mau menjelaskan?

Oh, iya. Oh ya. Oh, iya baik.

Pengantar dari saya itu. Mudah-mudahan tidak ber (*suara tidak jelas*) bahkan memang kemarin di Kolaka Utara saya dengar sudah bikin, pada saat ada ulang tahun Sulawesi Tenggara, apa, apa, Rekor Muri, ya, untuk percobaan makan gratis sebanyak 22.000, ya? Orang sekali makan kemarin.

Memang sudah bermacam-macam daerah ini me, me, me, apa, memformulakan seperti apa, ini diformulakan karena memang yang pasti bahwa target yang diinginkan oleh pemerintah adalah bagaimana mencapai makanan itu bergizi, tapi kemudian dengan seminimal mungkin anggarannya, begitu, ya. Jadi, memang ini harus dilihat. Jadi, bukan-bukan.

Jadi, kalau dikatakan 10.000, enggak ada itu anggaran 10.000, *ndak*. Pokoknya targetnya bergizi, ya. Mau berapa nanti nilainya karena tentu masing daerah-daerah ini berdinamika, ya, tidak bisa antara kita-kita yang ada di kawasan timur Indonesia ini dengan yang ada di kawasan barat, saya kira, tidak mungkin bisa sama. Pasti akan berbeda-beda dinamikanya akan berbeda.

Mungkin di kita bisa lebih murah atau bisa lebih mahal. Ya, sehingga memang, ya, targetnya bergizi dan bisa target bergizi itu sesuai dengan kedaerahan kita, ya seperti apa nanti kemudian nanti kita lihat. Tentu daerah-daerah yang jauh dari laut tidak mungkin mau harus ikan air, ikan asin, air asin. Tapi tentu mungkin bisa dimanfaatkan dengan yang air tawar atau yang lain dengan lainnya. Jadi, dinamikanya pasti begitu. Walaupun memang di dalam komposisi bahan bakunya sudah disampaikan, tapi itu tidak mengikat. Disesuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing seperti apa.

Bahkan kita dengar kemarin terakhir mungkin daun kelor juga akan menjadi. Ah ini kalau daun kelor persis dengan kita, ya? Khususnya teman-teman di kepulauan, nah ini bisa jadi bahan baru ini untuk kita di Sulawesi Tenggara.

Dan untuk itu, Bapak sekalian, saya sebelum kita masuk, saya mungkin inginkan ada perkenalan dari Bapak sekalian, sebelum menyampaikan aspirasi-aspirasi yang di bawah dari sana seperti apa untuk kami tampung, nanti kemudian apa yang bisa kami sampaikan sebagai jawaban ataukah nanti karena akan disampaikan ke para pimpinan dan salam hormat karena mohon maaf sekali lagi memang karena dalam situasi reses, pimpinan tidak ada yang hadir, ya, saya mewakili dan saya diberi amanah oleh pimpinan untuk menerima Bapak-bapak sekalian karena saya tahu persis juga jauh-jauh datang, kemudian tidak ada yang menerima.

Terima kasih banyak semuanya. Saya kira, ini dulu dari saya dan saya persilakan ke Pak Ketua barangkali untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan aspirasi yang dibawa dari sana seperti apa kemudian yang bisa kami tampung di sini untuk menjadi bahan. Kami akan laporkan ke pimpinan nanti kemudian.

Terima kasih. Saya persilakan.

KETUA KOMISI IV DPRD SULAWESI TENGGARA (ANDI MUH. SAENUDDIN, S.Si., M.Si):

Izin.

Bismillahirrohmannirrohim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Komisi IX DPR RI yang menerima kami pada kesempatan hari ini.

Sebelum kami melanjutkan, kami dalam jadwal ini memang sebelumnya belum mengecek jadwal reses DPR RI sehingga di penjadwalan kunjungan atau konsultasi kami dari komisi IV DPRD Provinsi sudah berjalan. Sehingga, ya dengan segala cara juga terima kasih kepada, khususnya teman-teman staf yang fasilitasi kami kemarin. Ada Pak Rozali, ada Ibu Lilis dan lainnya.

Pimpinan, kami izin memperkenalkan diri dari DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertama, saya nama di Muhammad Saenuddin asal Fraksi Partai Golkar, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin masing-masing teman-teman boleh memperkenalkan diri sebelum kami lanjut untuk menyampaikan beberapa hal di aspirasi kesempatan ini.

Silakan, Bu.

Dimulai dari, oh silakan dari. Silakan, Bu.

ANGGOTA KOMISI IV DPRD SULAWESI TENGGARA (Hj. ISYATIN ASWAD):

Bismillahirrohmannirrohim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Izin, Pimpinan, kami memperkenalkan diri. Nama saya Hj. Isyatin Aswad dari Fraksi Partai Demokrat Komisi IV.

Demikian barangkali perkenalannya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ANGGOTA KOMISI IV DPRD SULAWESI TENGGARA (Hj. GUNARTIN, S.E.):

Bismillahirrohmannirrohim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi,
Salam sejahtera,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Saya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hj. Gunartin Sarjana Ekonomi dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Dapil I Kota Kendari.

Demikian. Terima kasih.

Wabilahitaufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ANGGOTA KOMISI IV DPRD SULAWESI TENGGARA (Dra. Hj. MUNIARTY M. RIDWAN ZAKARIA):

Bismillahirrohmannirrohim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Komisi IV, eh, Komisi IX DPR RI, yang dalam hal ini kepada Bapak Haji Ahmad Safei dan seluruh jajaran yang sempat hadir pada pagi hari ini,
Yang kami hormati Ketua Tim Komisi IV, ya, Ketua dan seluruh Anggota dan pendamping.**

Izin saya memperkenalkan diri. Saya Hj. Muniarty M. Ridwan Zakaria dari Fraksi PAN, ya, dari Partai PAN dari Dapil Sultra III. Buton Utara, Muna, dan Muna Barat.

Demikian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ANGGOTA KOMISI IV DPRD SULAWESI TENGGARA (MUHAMMAD MUSTASHIM SAEFULLAH, S.Ars):

Baik.

Bismillah.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara, Ayahanda kami, Pak Haji Ahmad Safei,

Yang kami hormati Ketua Komisi kami dan seluruh Anggota yang kami hormati juga, para staf pendamping.

Izin, Ayahanda, perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mustashim Saefullah. Saya berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, Dapil I Kota Kendari.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ANGGOTA KOMISI IV DPRD SULAWESI TENGGARA (ALI MARDAN, S.Sos):

Izin.

Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Izin, Pimpinan Komisi IX beserta jajaran atau staf yang ada di Komisi IX.

Ketua Komisi beserta Teman-teman Anggota DPR Provinsi Sulawesi Tenggara yang kami hormati.

Nama saya Ali Mardan dari Dapil Kepulauan Sultra IV yaitu mewakili Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi. Nah, mungkin itu saja.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ANGGOTA KOMISI IV DPRD SULAWESI TENGGARA (LA ODE MUZZAFAR, S.H.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Komisi IX DPR RI bersama staf dan jajarannya,
Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV Sulawesi Tenggara bersama Teman-teman DPR Sulawesi Tenggara Komisi IV.**

Baik. Izin, Pimpinan, memperkenalkan diri. Nama saya La Ode Abdul Muzzafar dari Fraksi Gerindra, Daerah Pemilihan Kepulauan Buton. Yang biasa istilah di, kalau di kita di Kepulauan Buton, Pak. Semoga teraminkan ke depan, insyaallah.

Ya, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA KOMISI IV DPRD SULAWESI TENGGARA (ANDI MUH. SAENUDDIN, S.Si., M.Si):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Izin, Pimpinan, kami melanjutkan.

Yang saya hormati dan sangat saya banggakan, orang tua kita Bapak Haji Ahmad Safei.

Alhamdulillah menerima kami di Komisi IX pada kesempatan baik ini. Puji syukur tentu kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kebaikannya sehingga *alhamdulillah* pada kesempatan baik ini kita berkumpul dan bersama-sama di tempat ini dalam rangka menjawab tantangan dan pertanyaan publik yang ada di daerah terutama kita di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Izin, Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian, bahwa terkait ini kami sudah sebulan yang lalu melakukan rapat-rapat kerja bersama OPD atau Organisasi Perangkat Daerah Kepala Dinas di Provinsi Sulawesi Tenggara dan paling banyak pertanyaan hari ini adalah bagaimana kemudian mekanisme, juknis, kuota, kapan dimulai, sumber anggaran dan sebagainya yang, ya, di mana-mana kita juga melihatnya di media barangkali belum lengkap. Sehingga kami berharap melalui audiensi hari ini, kebetulan Bapak, orang tua kita, Bapak Haji Ahmad Safei juga dari Dapil Sulawesi Tenggara bersama seluruh jajaran di Komisi IX dengan kondisi kita terbatas, ya, mungkin masih reses.

Tetapi kami nanti mendapat beberapa informasi tambahan yang kemudian dapat menjelaskan kepada para pihak yang hari ini menjadi *stakeholder* bagian dari program makan bergizi gratis utamanya dan tentu selain itu, Pimpinan, kami juga mungkin sebentar ingin mendengar karena kita sudah ada di tempat ini, jika waktu memungkinkan, tentu isu-isu nasional terkait Kementerian Kesehatan yang juga ada di Komisi IX ini dan terkait dengan kesra, ya. Tetapi tentu fokus kita sesuai surat yang sudah kami sampaikan bahwa kami ingin mendengar dan mendapat beberapa referensi informasi terkait dengan kapan dan seperti apa dimulainya program makan bergizi gratis di daerah, khususnya kami, di Sulawesi Tenggara.

Nah, beberapa informasi yang sudah kami coba juga lakukan, misalnya melalui Diknas dan Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tenggara, hanya memberikan jawaban bahwa mereka hanya sebatas penyedia data anak yang akan menjadi calon penerima MBG. Lalu ketika kita konfirmasi selanjutnya kebanyakan menyampaikan bahwa *leading sector* utamanya ada di Badan Gizi Nasional sehingga hemat kami setelah kami rapat diinternal di komisi IV DPRD Provinsi Sultra, maka kesimpulan kami sementara adalah bagaimana kemudian

mendapat kesempatan untuk *audience* dengan Komisi IX DPR RI yang selanjutnya mungkin nanti kami akan diberi jalan atau simpul konsultasi lebih teknis kepada Badan Gizi Nasional Republik Indonesia.

Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian, itu barangkali yang menjadi *highlight* kami hadir di tempat ini. Sekali lagi, kami menyampaikan banyak terima kasih sudah diterima di forum Komisi IX ini yang sekaligus juga kita bersilaturahmi dengan Perwakilan DPR RI dari Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara yang ada di Komisi IX, Bapak Haji Ahmad Safei, orang tua kita, ya.

Semoga kita sehat walafiat dalam hal, terutama kita ini di komisi kesehatan, ya, tentu semua pihak menanyakan ke tupoksi kita, Pak, seperti apa, sehingga dengan pertemuan hari ini tentu akan menambah informasi ke kita semua, terutama di Provinsi Sultra ini tadi sudah digambarkan bahwa di Sultra ini sangat luas, ada daratan, ada kepulauan. Semua kita menjawab tantangan yang ada, tentu kita sangat membutuhkan banyak informasi, petunjuk dan arahan juga dari Bapak/Ibu yang ada di DPR RI.

Itu barangkali sementara dari kami. Mudah-mudahan bisa mendapat tanggapan yang baik. Sebelum ditambahkan kepada yang lain, kami kembalikan ke Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H./F.PDI PERJUANGAN KOMISI IX DPR RI):

Baik. Terima kasih.

Ya, ya, ya baik. Ini sulit ini, kita juga belum. Jadi, kondisi, tadi sebelumnya saya ingin, mohon maaf tadi saya tidak sempat. Kami di Komisi IX itu ada 43 orang yang terdiri dari 9 fraksi ada semuanya dan diketuai oleh Ibu siapa? Ibu Felly Estelita dari Nasdem, ya, ketuanya kami.

Kemudian kami bermitra dengan 8 kementerian dan lembaga, 4 kementerian, 4 lembaga. Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Imigran, kemudian Kementerian Kependudukan dan Perlindungan Anak, kemudian BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Badan POM dan Badan Gizi. Jadi, 8 itu mitra kami.

Kemudian terkait dengan makan bergizi ini, seperti disampaikan tadi, memang masih dalam uji coba semuanya, tapi yang pasti kita nanti itu di setiap provinsi akan ada satuan pelaksana yang akan dibuat dan *alhamdulillah* kemarin sudah termasuk listrik negara ada 26, apa, pembentukan satuan kerja ini yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden, termasuk dengan kita di Sulawesi Tenggara sudah ada juga. Waktu kita pertemuan kemarin belum, baru kemarin

diresmikan Pak Presiden 26 provinsi yang sudah ada organisasi sementara dibuat dan ini nanti yang akan dibiayai ke seluruh kabupaten.

Jadi, semua, saya kira, semua pada saatnya nanti akan ditangani oleh Badan Gizi ini seperti apa kemudian Badan Gizi karena sekali lagi organ ini juga baru dibentuk, ya, tentu sekarang masih apa. Tetapi memang targetnya yang paling banyak berperan nanti itu antara Bumdes dan koperasi. Ini yang paling banyak berperan.

Memang banyak daerah termasuk di, di Kolaka sudah ada itu, Pak. Sudah ada juga Permen-Permen dan datanglah orang-orang tertentu menyampaikan kepada pedagang, kepada distributor, (*suara tidak jelas*) saya bisa fasilitasi Bapak untuk jadi distributor nanti di sini jadi apa, jadi apa, tapi kemudian ya ada dinamika keuangan yang ada kegiatan. Itu terjadi dimana-mana dan ini sebenarnya yang tidak kita-kita harapkan. Olehnya itu karena kita masih reses, ini saya juga titip kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, bahwa tolong disampaikan jangan percaya yang begituan. Yang pasti semua akan diatur oleh pemerintah melalui Badan Gizi, tentu akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di daerah terutamanya pihak-pihaknya TNI, polisi, ya, pemerintah daerah. Tentu juga nanti, tapi yang paling banyak akan berperan nanti yang akan ditunjuk menjadi pada peranannya adalah Bumdes dan koperasi itu. Cakep dah.

Jadi, di, kalau informasi yang kita dengarkan bahwa memang akan dibangun tiga, setiap, setiap 3 ribu orang itu akan dibuatkan satu dapur. Jadi, kita bisa membayangkan kalau tiga ribu orang satu dapur, kira-kira di Sulawesi Tenggara ada sekitar, ya dua ribuan dapurnya, ya. Kalau dua ribuan ada *ndak* implikasinya.

Saya kira, yang terpenting yang pertama, bagaimana kita bisa mengatur kemudian karena ini setiap tahun diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sekitar 40, ya. Jadi, kalau dua ribuan, nah, itulah seperti apa kemudian. Ah, tapi ini dinamikanya, ya, maju sebentar berjalan, tentu juga teman-teman yang baru dilantik kemarin ini menjadi, apa, jadi sebagai organ penyelenggara di Badan Gizi Negara, tentu, kan, menyesuaikan dengan kondisi wilayah. Seperti apa nanti ini Sulawesi Tenggara, ya, sehingga makanannya yang diramu seperti apa, sehingga bisa menjadi sebuah makanan yang betul-betul bergizi nanti kemudian ini juga sementara jalan. Tetapi, kepastiannya saya kira ini akan jalan karena kami semua di sini sudah setuju.

Komisi IX kabarnya sudah ada, kita mendorong ini program pemerintah untuk tetap dilaksanakan dan mau seperti apa dinamika keuangannya, yang pasti ini berproses karena ini adalah wajah pemerintah kita, ya, yang harus kita dorong, ya. Sulawesi Tenggara itu 17 kabupaten/kota, jumlah siswanya 765.436. Kemudian kalau dibagi per tiga ribuan ini sekitar 2.123 dapur. Kemudian akan dikelilingi nanti ada yang dikelola oleh Badan Gizi, kemudian ada juga yang

kemudian di, mungkin dipihaktigakan dengan lembaga lain, termasuk mungkin TNI ada di dalamnya ini, akan dibina kemudian.

Nah, ini yang nanti kita. Kemudian, tapi kemudian mohon maaf karena belum ada wilayah per kabupatennya, ini baru provinsi. Jadi, kita mau lihat. Tapi yang kita dengar, saya dengar kemarin bahwa memang di Kota Kendari sudah ada uji cobanya dua tempat mungkin, berarti baru Kota Kendari. Yang lainnya saya kira, perlu sementara diputar berjalan, ya, tapi itu dinamika.

Tapi, ya, terima kasih dari kehadiran Bapak/Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk kita jadikan pengawasan, kemudian nanti kita lanjut seperti apa. Tentu dinamika itu akan, akan selalu ada di, di lapangan, tapi kita berharap bahwa ini bisa, ya, berjalan dan kalau ada dinamikanya, tentu, ya, akan, akan diperbaiki, lah. Ya karena ini program, kan, bukan setahun, 5 tahun ini, ya.

Tentu karena ini barang bagus dan lagi lembaganya baru, programnya baru, tidak, tidak, apa, ya, orang yang memahami juga soal gizi ini juga belum terlalu banyak di daerah, ya tentu banyak. Tapi yang pasti akan (*suara tidak jelas*) dua dampak utama. Yang pertama, terkait dengan makan bergizi sendiri itu. Bagaimana menumbuhgizikan anak-anak supaya terhindar dari *stunting*. Yang kedua, dampak ekonominya pasti akan besar.

Kita bisa membayangkan saja kalau satu ukuran standar yang kita dengar-dengar pada 10.000, kalau satu dapur itu ada 3.000 orang yang akan dilayani makan tiap hari 3.000 kali 10.000 berarti, kan, 30 juta. Itu 30 juta tiap hari ke pasar satu dapur, habis barang di pasar, Pak. Kalau hanya ukurannya Pasar Mandonga selesai itu. Ya, begitu. Ini, ini, ini tiap hari, loh, bukan satu hari. Dampaknya tentu kalau itu yang terjadi, tentu kepada petani kita.

Bagaimana petani kita ini agar kita dorong betul-betul bisa, ya, memenuhi, ya, apa yang dibutuhkan itu. Karena kita, ya, terus-terang di beberapa bahan pokok kita juga di Sulawesi Tenggara ini, kan, masih mengharap Sulsel, ya. Ini yang harus kita gunting ini karena Sulsel juga lagi butuh sekarang, Pak, Sulsel juga lagi butuh. Kalau Sulsel butuh, *ndak* ada di sana, kita kalau tidak siap di sana, ah saya kira ini tentu Komisi IV juga ada kaitannya dengan pertanian.

Ini juga yang harus saya kira, yang harus disampaikan kepada pemerintah untuk mendorong ini agar supaya ada kesiapan petani kita untuk menyediakan bahan baku itu. Jangan sampai kemudian dibutuhkan, seperti telur, sayur-sayuran, ya. Kalau merasa ini *alhamdulillah* yang penting bisa dikendalikan Konawe, kemudian Konawe Selatan, kemudian Bombana bisa dikendalikan, ya jangan dibawa keluar. Saya kira, bisa terpenuhi.

Cuma persoalannya teman-teman kita yang di (*suara tidak jelas*) ada 9 kabupaten ini, yang selama ini memang sebagian besar bahan bakunya masih dari Sulsel, ini yang berbahaya. Kalau tidak dikendalikan, ya bagaimana? Karena

ini, ya, rutinitas ini, tiap hari. Jadi, taruhlah dalam sebulan 25 hari mungkin, ya, anak-anak sekolah. 25 hari ini kali sekian ribu anak-anak akan makan dengan apa serentak ini, ya ini kalau kita di Sulawesi Tenggara, tentu masih banyak hal yang.

Nah, ini yang harus saya kira, kita kendalikan. Bagaimana kita mengendalikan sambil kita dorong, kita punya masyarakat untuk memenuhi itu. Jangan kita berharap dari luar karena kalau kita berharap dari luar, ini sangat berbahaya. Sementara daerah luar juga masih butuh begitu banyak juga.

Hal-hal lain, saya kira, teman-teman sekalian, Bapak-bapak, Ibu sekalian dari Kendari jauh-jauh, ya, belum banyak yang bisa kami sampaikan di Komisi IX ini, tapi mudah-mudahan ini sementara akan dijadikan dilaporkan kepada Pimpinan untuk lebih detailnya nanti. Kemudian, mudah-mudahan kalau tidak bisa hari ini, bisa nanti kami sampaikan mungkin. Ya, ya.

Mudah-mudahan paling tidak, pertemuan kita hari ini, kami sudah mendapatkan bahwa aspirasi semacam begini di, dan ini saya kira, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, di daerah lain juga akan ada. Cuma yang lain mungkin belum sampai ke sini, nih, tapi ini juga memang aspirasi yang sudah kami sampaikan pada saat kami pertemuan dengan Badan Gizi kemarin. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa kami sampaikan secara tertulis, bisa, ya? Disampaikan? Hmm, ya, ya, ya, ya. Iya.

Mudah-mudahan betul ini peresmian lembaga Badan Gizi ini sudah terbentuk di Sulawesi Tenggara dan kalau sudah terbentuk, tinggal nanti dicari karena ini juga menjadi rekomendasi kami kemarin ketika kita rapat dengan Badan Gizi Pusat yang sudah disampaikan bahwa mohon teman-teman yang ada di daerah untuk setiap saat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Komisi IV, tentu untuk selalu berkoordinasi untuk membantu karena saya pikir juga saya kira, tidak semua dia kuasai, tentu Bapak-bapaklah yang pasti lebih menguasai wilayah, lebih mengetahui daerahnya seperti apa ini kemudian.

Tolong diberikan, selalu diberikan masukan agar supaya, ya, bisa diskusi Pak, karena ini menjadi salah satu rekomendasi kami kemarin. Tentu kami mohon agar supaya Badan Gizi yang ada di provinsi itu betul-betul selalu berkoordinasi dengan, ya, teman-teman yang ada di daerah. Karena kalau dia mau jalan sendiri, saya kira, akan sulit juga nantinya seperti apa ini. Ini tidak, tidak gampang saya kira.

Saya kira ini, dari saya. Kalau ada misalnya yang mau disampaikan, mungkin Bapak/Ibu sekalian, kami, saya persilakan. Ibu Ridwan pasti lebih paham, lah.

ANGGOTA KOMISI IV DPRD SULAWESI TENGGARA (Hj. ISYATIN ASWAD):

Baik.

Bismillahirrahmannirrohim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tadi kita sudah banyak mendaratkan dari yang menyampaikan dari Komisi IX DPR RI, *alhamdulillah* kami juga berterima kasih banyak. Kebetulan yang terima kami sama-sama dari Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya yang perlu kami pertanyakan. Yang pertama, terkait dengan tugas kami selaku tugas DPR yaitu pengawasan. Yang pertama, tadi saya kurang dengar mengenai struktur, struktur daripada organisasi sehingga kita di daerah ketika ada, apa, penyampaian-penyampaian, bisa kami berkoordinasi dengan siapa di daerah? Karena kemarin, kami ada kunjungan ke mitra, dalam hal ini di Dinas PK Provinsi Sulawesi Tenggara, kami menanyakan, mereka cuma menyampaikan bahwa cuma data yang diminta.

Karena ini sudah banyak, Pak, suara-suara sumbang yang disampaikan ke kami selaku wakil rakyat bahwa makanan bergizi itu sampai sekarang di mana? Karena mereka ini masyarakat sudah mendengar ini cuma uji coba-uji coba di Januari ini. Karena penyampaian itu bahwa makanan bergizi itu sudah akan dilaksanakan, tapi sampai saat ini cuma uji coba-uji coba. Nah, ini.

Ini kami, kan, sebagai wakil rakyat banyak dipertanyakan. Jadi, kami juga tidak bisa memberikan jawaban seperti bagaimana, sehingga kami cuma menyampaikan "Ini masih uji coba, nanti ini akan berlanjut, ya, akan berlanjut". Namun, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa mengenai anggaran itu akan dikondisikan, akan dikondisikan, tapi tidak. Tapi tadi Bapak juga menyampaikan bahwa itu tidak akan sama semua daerah, disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Nah, ini.

Tentunya kalau tidak disamakan di daerah-daerah lain, ini mungkin perlu pertimbangan yang lebih baik, karena kalau tidak sama di kondisi di daerah masing-masing itu mungkin akan menjadi polemik juga di daerah, kalau tidak sama kondisinya. Kalau artinya dalam hal anggaran, tentunya tidak sama satu daerah anggarannya begini, satu daerah anggarannya begini. Apalagi kami di Sulawesi Tenggara, Pak, Bapak sebagai wakil dari Sulawesi Tenggara pasti memahami kondisi di Sulawesi Tenggara semua serba diimpor dari luar. Nah, ini.

Kemudian selanjutnya. Mengenai keuangan pemberian makanan tambahan bergizi. Tadi juga saya pas mau berangkat ke sini, saya *nonton* di televisi, *nonton* di televisi ada di bawah *running text*-nya itu usulan dari DPD RI bahwa untuk pemberian makanan bergizi bisa dipakai dana zakat. Nah, ini artinya bisa, artinya ini DPD RI dengan DPR RI supaya sinkron. Jangan memasukkan di *running text* bahwa itu bisa dipakai dana zakat, seperti bagaimana.

Nah, kemudian juga ini ada kekhawatiran masyarakat setelah adanya makanan bergizi bahwa bahan-bahan itu di pasar akan serba naik. Nah, ini, ini kekhawatiran Ibu-ibu ini akan naik dan ini saya bilang, dan ini memang sudah naik, tapi kita tidak tahu naiknya seperti bagaimana. Apakah naiknya karena PPN 12% atau naiknya karena ada kondisi pemberian makanan bergizi. Nah, ini.

Barangkali demikian dulu, Pak, untuk dari saya, dari Hj. Isyatin Aswad dari Fraksi Demokrat. Nanti sebentar kita akan berlanjut lagi. Demikian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H./F.PDI PERJUANGAN KOMISI IX DPR RI):

Ya, silakan, Bu, ya.

ANGGOTA KOMISI IV DPRD SULAWESI TENGGARA (Dra. Hj. MUNIARTY M. RIDWAN):

Baik.

Bismillahirrohmannirrohim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Bapak Ahmad Safei, Anggota Komisi IX DPR RI beserta Jajaran,
Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara beserta Jajaran.**

Di sini kami tadi sudah bahas, Bapak pun sudah sampaikan masalah makanan bergizi yang belum terlalu jelas sumber dananya, seperti itu, Pak. Seandainya ada dananya atau sudah kita tahu dananya dari mana, tentu tadi sudah disampaikan oleh teman bahwa akan naik semua bahan-bahan makanan di pasar, seperti itu, tetapi itu kalau memang ada anggarannya. Ada beberapa hal juga yang perlu kita sampaikan atau kita perhatikan masalah pengelolaannya, seperti itu, Pak.

Mungkin, pertama, cara pengelolaannya itu menjadi dipihakketigakan, makan siang gratis agar jangan jadi bisnis kelompok tertentu, seperti itu. Dua, mungkin perlu kita perhatikan juga masalah standar baku yang dimiliki oleh penyedia pihak ketiga harus memenuhi kriteria keahlian keilmuan gizi. Juga, tiga, mungkin keadilan menunjuk syarat pihak ketiga agar tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu, termasuk kuota yang akan diberikan semakin banyak pihak

ketiga, semakin banyak, seperti itu, Pak. Karena ini akan menjadi, jangan sampai jadi bisnis lagi, Pak, iya.

Karena saya pernah juga *nonton* tadi malam, sebelum, ini belum berjalan karena sudah beberapa restoran yang dituju, itu pun saya lihat *nonton* di TV. Sudah diberitakan beberapa restoran yang akan menangani makanan bergizi, tapi ala-ala ada lagi yang penipu-penipu tidak bertanggung jawab sudah mengadakan menelepon yang sudah ditentukan restoran bahwa “Kalau kamu mau diikutkan untuk menangani masalah ini, makanan sehat, kamu harus menyeter uang sekian-sekian,” seperti itu. Mungkin itu yang perlu diperhatikan untuk pemerintah.

Demikian. Terima kasih.

*Wabilahitaufiq walhidayah,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H./F.PDI PERJUANGAN KOMISI IX DPR RI):

Ya, terima kasih.

Ada selanjutnya yang mau disampaikan? Iya, supaya sekalian.

ANGGOTA KOMISI IV DRPD SULAWESI TENGGARA (Hj. ISYATIN SYAM, S.Ip):

Bismillahirrohmannirrohim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang terhormat, Bapak Haji Ahmad Safei bersama Jajaran yang sempat hadir pada pagi hari ini,
Yang kami hormati Ketua Komisi IV bersama Rekan-rekan Anggota yang sempat hadir dan seluruh pendamping yang mendampingi kami.**

Terima kasih, Pak. Mungkin beberapa hal, Pak, ya, ada yang mungkin sudah dibahas oleh teman dan mungkin ada sebagai penambahannya. Jadi, Program Makan Bergizi Gratis ini, Pak, yang sebenarnya dari dulu itu sudah ada, Pak, hanya mungkin namanya berbeda.

Di zaman SBY, ya, itu ada pemberian makanan tambahan, ya, itu yang selalu diberikan. Nah, suka, iya, di sekolah-sekolah biasanya TK, ya, terutama TK kalau pemberian makanan tambahan. Kemudian memang sumber pembiayaan ini sebetulnya menjadi pertanyaan banyak orang, siapa sebenarnya yang akan membiayai ini, iya seperti itu. Karena sekarang memang sudah hampir seluruh kabupaten sudah uji coba. Semuanya masih uji coba, Pak, ya, uji coba dan itu

partisipasi daripada OPD. OPD-OPD yang *ndak* ada di kabupaten dan saya melihat itu terlibat TNI, ya, Polri, ya, untuk pelaksanaannya mungkin masih (*suara tidak jelas*), tetapi belum melaksanakan seutuhnya, Pak, ya.

Kemudian untuk sebenarnya secara resmi akan dilaksanakan ini pemberian makanan bergizi gratis ini karena ini, kan, masih uji coba, Pak, ini masih uji coba. Jadi, secara nasional mungkin ada nanti suatu saat akan waktunya kapan secara resmi di-ini, ya, dibuka, ya, seperti itu. Dan, ya, tentunya terkait dengan Badan Gizi Nasional, Badan Gizi Provinsi, dan juga pastinya Badan Gizi Kabupaten, Pak, ya? Itu masih karena di sana nanti akan tentunya ada juknis pelaksanaannya, Pak, ya? Ya seperti itu, seperti apa kita laksanakan.

Nah, ini juga menjawab pertanyaan bagi masyarakat, apakah makanan bergizi gratis itu akan diberikan tiap hari, atau tiap minggu, atau mungkin berapa kali dalam satu bulan, Pak? Itu pertanyaan untuk kami. Nah, kalau tiap hari, Pak, kita bisa bayangkan bagaimana pendanaan, Pak, ya, bagaimana pendanaan. Apalagi kalau memang dibebankan ke OPD-OPD atau pemda setempat, ya. Jadi, seperti itu.

Kemudian ini dampak, ya, tentunya ada berapa dampak yang tadi disampaikan kepada kita bahwa dampak yang pertama adalah pencegahan *stunting*. Itu betul sekali karena yang akan diberikan ini adalah mungkin TK, SD, SMP, ya. Jadi, mencegah *stunting*, ya, yang ada di seluruh kabupaten seluruh Indonesia.

Kemudian dampak ekonominya. Kembali lagi tadi, Pak, sekarang saja sudah mulai naik harga, Pak, ya, dan itu dengar-dengar (*suara tidak jelas*) ini akan naik harga di pasar, ya, karena apalagi menjelang puasa lagi, Pak, iya tambah naik lagi, iya. Iya, kita beberapa daerah di Sulawesi Tenggara itu memang sudah bisa menyediakan pangan sendiri, ya, tapi masih dalam jumlah terbatas. Seperti kami daerah pesisir, Pak, ya, kalau ikan, ya memang kami penghasil ikan, Pak, tapi ketika nanti pelaksanaan secara menyeluruh itu pasti nanti akan naik harga, ya.

Kemudian kesiapan petani kita. Ini walaupun diberikan kesempatan, tapi ada lahan-lahan tertentu yang tidak bisa diolah, Pak, ya. Ini daerah tertentu seperti di dapil kami, ya memang ada daerah subur, ada juga daerah yang kurang ini-nya, menjanjikan. Dan ini mungkin seperti tadi kami dengarkan secara bersama bahwa itu nanti Bumdes dan koperasi akan dilibatkan.

Nah, mengenai Bumdes dan koperasi di seluruh kabupaten/kota itu tidak semuanya berhasil, Pak. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Karena ini nanti, kan, di setiap kecamatan akan dilaksanakan pemberian makanan bergizi dan gratis ini. Nah, bagaimana ini kesiapan dari Bumdes kalau memang Gerindra tanggung jawab kepada mereka.

Saya kira, ini sementara, Pak, saya cukupkan sekian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan.

*Wabilahitaufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H./F.PDI PERJUANGAN KOMISI IX DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kita respons dulu yang tiganya.

Baik. Ada beberapa catatan saya. Yang pertama, tadi terkait dengan struktur. Struktur itu saya katakan tadi, secara resmi lembaganya sudah disahkan oleh Bapak Presiden kemarin 26 provinsi itu, strukturnya seperti apa kalau yang kami pegang sekarang, apakah benar strukturnya ini sama dengan yang ada di wilayah dengan yang ada di pusat ini, itu juga kami belum tahu. Tapi kalau yang ada di sini, di pusat, jelas sudah. Apakah nanti sama dengan yang ada di daerah dengan yang ada di pusat, itu yang kita belum tahu kalau struktur. Tapi *insyaallah* akan mirip-mirip seperti ini, lah. Tentu akan (*suara tidak jelas*)

Kemudian dari sumber dana. Sumber dana yang pasti bahwa semua dari APBN, ya. Kalau akan melibatkan swasta, nanti kemudian nanti mungkin ada hal lain, tapi yang pasti semua APBN. Nah, itu yang saya katakan tadi, yang sekarang ini sudah tersedia anggaran yang pasti sudah ditetapkan kemarin di Komisi IX ini, ada 71 triliun untuk, 71 triliun untuk 17 juta.

Iya, ya, 17 juta, ya? Iya, 17 juta.

71 triliun itu untuk, ya, 17.890.293 orang, ya, dan ini yang akan diselesaikan dan *insyaallah* akan dikejar terus mungkin sampai dengan akhir tahun ini sampai dengan 50 juta.

Ya, tentu kalau sampai 50 juta, ya tentu biaya itu akan bertambah terus dan target secara keseluruhan itu delap, seluruh Indonesia nanti pada akhirnya nanti akan sampai 80 juta. 50 juta itu yang terdiri dari SMA, SMK, SMP termasuk sanawiah, pesantren, SD, TK, ya, sekolah-sekolah agama, kemudian ibu hamil. Itu targetnya, ya. Jadi, memang cukup banyak. Jadi, SMA, SMK, Aliyah, ya, ya, pesantren-pesantren, SMP, ya, sanawiah, SD termasuk sekolah agama ibtidaiah, ya, ibu hamil, TK. Ini semua yang agak itu jangkauannya.

PAUD. Iya, saya kira, PAUD juga termasuk karena PAUD dalam lingkungan TK, ya. Ya dua TK ini, ini semua. Ya, PAUD. Ada 12, ya. Ibu menyusui, balita sehat, balita gizi kurang, balita, ya, badan, berat badan kurang, ibu hamil sehat, hamil bermasalah gizi, anak santri, anak SLB, anak SMA, Madrasah Aliyah,

SMK/ sederajat, anak SMP, sanawiah sederajat, SD sederajat, PAUD, TK sederajat. Jadi, yang jumlahnya itu 51, 17 juta, 17 juta orang, ya.

Kemudian terkait dengan harga pasar, mudah-mudahan ini terjadi karena yang diharapkan sebenarnya satuan pelaksanaan ini tidak beli ke pasar, tapi dia membelinya langsung ke petani melalui Bumdes dan koperasi. Tadi disampaikan Bumdes juga banyak bermasalah, nah ini yang kita akan perbaiki. Ya, tentu ini tugasnya kita semuanya nanti kemudian untuk memperbaiki seperti apa, tapi kita berharap bahwa memang sumber bahan baku ini tidak bersumber dari pasar, tapi bersumber dari petaninya langsung. Jadi, petani menjual ke koperasi, koperasi yang jual ke, ke pengelola ini. Sama juga kalau dalam petelur, ya, peternak, peternak langsung kepada Bumdes atau koperasi, baru kemudian ke pengelola.

Kalau nelayan, tentu ada koperasi nelayannya nanti langsung ke pengelola. Jadi, bukan di pasar, kalau di pasar yang diganggu, tapi ini persoalannya memang kalau bahan bakunya kurang, yang saya, saya khawatirkan barang ini tidak akan ada sampai ke pasar. Ya, memang situasinya kita, utamanya kita yang ada di, ya, Sulawesi Tenggara ini masih banyak daerah-daerah yang memang kebutuhan pasarnya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, tapi ya itulah karena ini menjadi program pemerintah, ya, harus kita dukung, harus diberi *support*.

Bagaimana caranya dinamikanya, nanti kemudian ini yang. Makanya kita ingin sampaikan bahwa memang ini masih dalam tahapan uji coba- uji coba terus untuk kita melihat formula apa yang kita gunakan. Nanti apakah formulanya seperti yang disampaikan tadi Ibu bahwa nanti mungkin bisa dipihakketigakan atau di, apa. Ya, tentu formula-formula itu semua yang akan dilihat. Apakah nanti dilihat oleh TNI, ya seperti apa kemudian yang betul pasti akan dicari yang terbaik, lah, agar supaya program ini bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan.

Tapi kita semua berharap melalui dengan kajian yang Bapak/Ibu sekalian di sini, ya tentu kita berharap untuk juga nanti kemudian men-*support* kegiatan ini agar supaya memang betul-betul bisa berjalan. Dinamika yang lain-lain, saya kira, pasti berdinamika, pasti banyak dinamikanya. Ya, utamanya daerah-daerah yang memang tidak surplus pangan, ya memang agak kesulitan, ya, karena memang kita masih banyak sekali, mungkin masih setengah dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara itu mungkin masih setengahnya itu masih, masih kita disuplai. Yang, yang surplus itu, kan, cuma ada beberapa daerah di daratan, ya, yang bisa surplus. Yang lainnya, saya kira, mungkin agak, agak kesulitan. Tapi, ya, ini karena menjadi program, sekali lagi karena ini menjadi program, tentu (*suara tidak jelas*) kita untuk berhasil bagaimana kita mengaturnya nanti. Kemudian seperti apa, ya, saya kira, ya.

Tapi kalau Sulawesi Tenggara secara umum yang saya pahami, kebutuhan surplus kita sebenarnya kita surplus Sulawesi Tenggara, kalau secara umum, yang penting bisa diatur dengan baik. Yang penting saya katakan tadi, Konawe, Konawe, Bombana, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Timur tidak mem, tidak

membawa keluar Sulawesi Tenggara. Kalau bawa keluar Sulawesi Tenggara ini yang kacau, ya.

Hal lain saya kira, ya. Betul bahwa sebenarnya dulu ini ada yang miripnya dengan program ini dengan, apa namanya, makanan tambahan, ya, ya, itu memang. Dan ini tiap hari, Bu, ya, ini makannya tiap hari, loh. Bukan kalau makanan tambahan dulu sekali seminggu kayaknya, sekali sebulan, ya, dan itu pun hanya anak TK, sekarang tidak. Ini nanti tiap hari dan itu mulai dari SMA sampai ke PAUD semua mendapat termasuk ibu hamil yang akan mendapatkan.

Iya, kalau untuk tenaga kerja saya kira nanti kalau yang kita dengar sampai sekarang ini belum resmi dulu, tapi yang kita dengar bahwa setiap dapur itu akan membutuhkan karena akan melayani 3.000 orang, akan membutuhkan 40 tenaga kerja. Ya, mudah-mudahan, nih. Kalau ini juga ini peluang untuk kita semuanya, ya, selain tadi saya katakan peluang ketenagakerjaan, juga akan meningkatkan secara ekonomi petani juga akan, pasti akan. Ya, kadang kala petani kita ini, kan, mau menanam, tapi takutnya kalau menanam mau jual ke mana, tapi kalau ini sudah pasti ada, ya, pasarnya ada, ya.

Yang ketiga mudah-mudahan dampaknya bisa meningkatkan, ya, gizi anak-anak kita untuk kemudian menjadi baik semua sehingga *stunting* ini bisa teratasi, begitu.

Saya kira itu, penjelasan dari saya. Kalau masih ada yang mau disampaikan. Saya persilakan, ya.

Teman-teman sekalian, silakan, Pak.

ANGGOTA KOMISI IV DPRD SULAWESI TENGGARA (MUHAMMAD MUSTASHIM SAEFULLAH, S.Ars):

Baik. Mohon izin, Pimpinan.

Terima kasih atas kesempatannya.

Tadi sebagian besar sudah ditanyakan oleh senior kami dan sudah dijawab oleh Pimpinan terkait dengan penyaluran makan siang bergizi gratis ini. Mungkin kami singkat saja, Pimpinan.

Yang pertama, terkait dengan, menarik tadi terkait dengan anggaran yang disediakan yaitu 71 triliun kalau tidak salah untuk 17 juta siswa kita yang ada di seluruh Indonesia. Kalau saya hitung-hitung secara ilmu standar saya ini yang ada tadi, berarti untuk 25 hari itu, anggarannya ternyata per-satu siswa itu cukup tinggi.

Jadi, berbeda ketika tadi kami sudah mendengar angkanya. Berbeda dengan apa yang kami dapatkan di media bahwa ada hiruk-pikuk bahwa ada yang

10.000 per porsi, ada yang 15.000, ada yang 25.000, dan lain sebagainya. Tetapi di, ketika dikalkulasi dengan angka yang tadi disebutkan, berarti setiap siswa itu anggarannya 162.000.

Mungkin saya salah atau mungkin dikoreksi dalam penghitungan saya tadi. Sebenarnya apakah ini memang sudah, sudah apa namanya, akan ada kestabilan? Karena ketika ada program yang dilakukan setiap hari ini, seperti yang dikatakan bunda kita tadi, akan berdampak sama harga pasar. Jadi, kami yang tidak dapat kebagian, ya, makan siang gratis, ya, ke pasar mungkin bakalan terbatas untuk stok. Mungkin itu yang terkait dengan angkanya.

Dan yang kedua adalah terkait sampah, mungkin. Apakah sudah dipikirkan terkait sampah karena kami di Kota Kendari sudah melakukan uji coba di SMP 2 dan di SD I Kendari. Dari aspirasi yang kami serap dari para guru, menanyakan bagaimana pengelolaan sampah dari penyaluran makan bergizi? Karena simulasi yang kami lakukan di Kota Kendari itu menggunakan, apa, kemasan yang memang sekali pakai.

Jadi, mungkin pertanyaannya bagaimana terkait kemasan ini. Apakah ada pengelolaannya atau memang dari penyedia ini, memang bisa dipakai berulang-ulang untuk alat makannya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H./F.PDI PERJUANGAN KOMISI IX DPR RI):

Baik, terima kasih.

Ya, memang ini. Jadi, perlu dihitung anggaran untuk Badan Gizi. Ya, mungkin sudah termasuk gajinya, pegawai di situ, sudah biaya operasional, biaya rapat, evaluasi, dan lain sebagainya. Jadi, yang 71 triliun itu untuk anggaran untuk Badan Gizi, mungkin di yang lain-lain juga akan segera.

Kemudian, ya, itu dampak terkait dengan sampah dan sebagainya, itu dampak. Ya, tentu itu menjadi tanggung jawab kita semuanya, bagaimana nanti melihat ini. Tapi kita berharap sekali lagi, saya berharap bahwa program ini *insyaallah* mudah-mudahan kita di Sulawesi Tenggara bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan saya kira, ya.

Saya kira itu, mungkin.

Yang lain? Ya. Cukup, ya? Ya, saya kira ini, Bapak/Ibu sekalian.

Silakan, silakan, Pak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPRD SULAWESI TENGGARA (ANDI MUH.SAENUDDIN, S.Si., M.Si):

Baik. Terima kasih, Pimpinan, dan kita semua.

Sebelum ditutup, izin, Pimpinan, dan staf di Komisi IX, jika diizinkan, kami ingin minta nanti bahannya untuk juga menjadi referensi kami di DPRD Sultra. Ya, tentu tadi seperti yang disampaikan bahwa masih terjadi dinamika banyak hal terkait itu, tapi paling tidak dan ini menjadi peraturan kami juga di provinsi untuk kemudian mengelaborasi dengan segala informasi yang masuk.

Demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H./F.PDI PERJUANGAN KOMISI IX DPR RI):

Ya, baik.

Bapak/Ibu sekalian, sekali lagi, atas nama Komisi IX, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian, ini adalah bagian tugas kita semuanya. Apalagi saya kemudian mendapat tugas untuk menerima Bapak/Ibu sekalian, ini, ya. Tapi sekali lagi, saya walaupun dari Fraksi PDI Perjuangan, saya berharap bahwa memang komunikasinya sudah bangun, Pak. Karena kehadiran saya di sini, tentu bukan mewakili PDI Perjuangan, tapi mewakili rakyat Sulawesi Tenggara.

Jadi, kalau ada hal-hal lain, ya kita bisa komunikasikan nanti di daerah seperti apa. Seperti saya katakan tadi, kami di sini adalah delapan, empat kementerian dan empat lembaga. Ya, kalau hal-hal yang terkait dengan hal ini, saya kira, kita bisa komunikasi langsung seperti apa untuk kita nanti bisa fasilitasi seperti apa yang bisa kita tangani agar supaya betul-betul keterwakilan kita di sini ada manfaatnya, lah, ya.

Kemudian ada, oh iya.

Saya kira ini, sekali lagi terima kasih banyak. Salam hormat dari seluruh Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX yang, mohon maaf sekali lagi, bahwa hari ini tidak bisa hadir karena masih dalam situasi reses. Ya, tapi mudah-mudahan pada kesempatan lain kita masih akan berkomunikasi, baik dengan tema ini atau tema yang lainnya.

Salam hormat saya kepada teman-teman yang lain di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, baik dari Komisi IV maupun Komisi I, II, III. Nah, ini kita berjuang bersama-sama, Pak, memang masih banyak ini kita punya pekerjaan

rumah di Sulawesi Tenggara yang harus kita selesaikan. Bukan hanya persoalan makan bergizi ini, tapi juga banyak sekali persoalan-persoalan lain yang *alhamdulillah*, saya kira, ya, keterwakilan kita yang ada 6 orang di DPRD, DPR RI ini mudah-mudahan bisa ada manfaatnya kemudian untuk kita sama-sama membangun Sulawesi Tenggara.

Saya kira, demikian. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak dan mohon maaf, jika ada pelayanan yang juga kurang berkenan di hati Bapak/Ibu sekalian. Terima kasih dan saya akhiri.

*Billahitaufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.52 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

TTD

**Lilis Suryani, S.E.
NIP.197004221990032001**